I.dn.J.of Law 6(1) : 85-90, Desember 2023
DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3814

Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN : 2477-197X
https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS

An Analysis the Implementation of Driving License Issuance in the Maros Resor Police

Franssiscus Patrick Siahaya[1*], Baso Madiong[2], Basri Oner[2]
[1]Kepolisian Resor Maros
[2]Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: patrick21@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta Kesadaran Masyarakat yang produktif terhadap aturan Hukum Lalu Lintas. Dalam Proses penerbitan SIM di Polres Maros, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat terwujudnya kelengkapan surat-surat bagi pengemudi. Biaya yang masih relatif memberatkan untuk kalangan masyarakat di desa, edukasi terhadap persyaratan serta akses jaringan internet yang harus diperhatikan.

Kata Kunci: Implementasi, Penerbitan, Surat Izin Mengemudi, Maros

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the Maros Resort Police has completed the implementation and service of making a driver's license. in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public Awareness of the rules of Traffic Law. In the process of issuing a SIM at the Maros Resort Police, there are still several obstacles that hinder the realization of the completeness of the documents for the driver. Costs are still relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.

Keywords: *Implementation, Issuance, Driving License, Maros*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Masyarakat mulai menerima bahwa Polri adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) sejak Polri mulai menerbitkannya lebih dari 50 tahun yang lalu. Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti pendaftaran dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Umum kepada seseorang yang memenuhi peraturan, berakal budi, memahami peraturan lalu lintas, dan cakap mengemudikan kendaraan bermotor. cara mendapatkannya dengan mengikuti beberapa peraturan kepolisian, khususnya Peraturan Kapolri No. 1 tentang prosedur operasi standar untuk mendapatkan SIM. tentang SIM dan UU No. 9 Tahun 2012 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menjadi anggota Polri, khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mewakilinya, ia harus menguasai registrasi dan identifikasi surat izin mengemudi. Dalam upaya mendukung kegiatan tersebut, antara lain pelatihan, penataran, dan pendidikan, dikembangkan Standar Operasional Prosedur pembuatan SIM untuk menghilangkan kesan negatif di masyarakat. Pelayanan kepolisian khususnya polisi lalu lintas yang terkait dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membeda-bedakan masyarakat. Pelayanan polisi lalu lintas kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus lebih profesional, prosedural, bermoral, dan transparan seiring dengan kemajuan reformasi. menyetir. Dalam menetapkan aturan atau metodologi kerja standar

untuk memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM), Polri pada umumnya dapat menerima perubahan keadaan individu.

Penerbitan layanan SIM juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu faktor utama penunjang lalu lintas dalam masyarakat modern. Alhasil, polisi lalu lintas pun memiliki mimpi dan misi yang sesuai dengan perbincangan yang akan segera diarahkan kepada Polri. Spekulasi ini mencoba kepada polisi lalu lintas sebagai penyelenggara negara atau manajemen yang terletak pada kebijakan manajemen yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang luar biasa terhadap keuntungan polisi yang luar biasa yang sesuai dengan asumsi daerah setempat dan dapat bekerja pada citra polisi lalu lintas. selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara, khususnya Polri.

Untuk memastikan bahwa SIM diterbitkan tepat waktu, diperlukan Satuan Lalu Lintas Polres Maros. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap Polres Maros untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat harus dipenuhi guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan mencapai hasil yang diinginkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, dan tanggung jawab pelayanan masyarakat.

Kondisi administratif seputar pembuatan SIM card di Satuan Lalu Lintas Polres Maros menunjukkan adanya kekurangan, terutama mengingat protes yang sering terdengar dari masyarakat umum dan yang tujuannya biasanya untuk pengurusan SIM. Dalam penyelenggaraan pembuatan SIM, setiap pembuat SIM yang tersusun harus mengikuti cara pembuatan SIM yang paling umum sesuai dengan standar dalam Norma Tata Cara Kerja (SOP) tentang SIM, padahal pelaksanaannya pembuatan SIM tidak mengikuti kerangka sesuai SOP, dari pendaftaran langsung hingga penerbitan SIM tanpa pengujian spekulasi. Praktis, unit yang menerbitkan SIM tidak menjalankan pedoman SOP SIM. Agar unit tersebut efektif dalam sistem hukum, ia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum. Jika sistem hukum tidak berjalan dengan baik, bisa dipastikan tatanannya akan campur aduk dan tumpang tindih. Secara alami, ada batasan yang mencegah sistem hukum bekerja dengan baik dalam situasi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris sebagai metode penyelidikannya. Polres Maros menjadi tempat penelitian. Hasil wawancara dengan informan, khususnya anggota Polres Maros, menjadi sumber informasi utama. Semua data yang sesuai akan dibedah dengan hati-hati, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan temuan penelitian, tanggung jawab dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon SIM menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pelayanan SIM sangat profesional. Sifat SDM yang digerakkan oleh polisi lalu lintas dan pekerja di Polres Maros memang luar biasa. dibuktikan dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang relevan, serta ketulusan dan tanggung jawab atas pekerjaannya.

Publik kini memahami kinerja pemerintah, baik dari segi sikap dan perilaku aparatur maupun kapasitasnya dalam memberikan pelayanan. Riset di lapangan menunjukkan bahwa pameran perangkat mendapatkan reaksi yang berbeda-beda, baik melalui komunikasi yang luas maupun lugas. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di Kantor Satuan Pelaksana (SATPAS) Polres Maros bahwa kinerja suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan petugas atau petugas. Dengan kata lain, kinerja karyawan berkorelasi dengan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang ada.

Menurut pembina, pejabat dan pekerja di Satuan Kerja Pengurusan Pengurus (SATPAS) Polres Maros hendaknya lebih mengembangkan latihan/pelatihan keahlian bagi pejabat. Dengan tujuan agar hasil akhir dari persiapan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kapasitas/kemampuan mereka dalam berbagai sudut pandang yang menjadi kewajiban dan kewajiban mereka.

b. Sarana dan Prasarana

Perkantoran dan yayasan merupakan salah satu komponen pendukung dalam penyelenggaraan pengurusan izin mengemudi di Polres Maros. Karena kehadirannya dapat memberikan efek yang sangat positif, salah satu faktor ini sangat penting. Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan” adalah setiap dan semua peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lainnya yang berfungsi baik sebagai alat utama maupun pelengkap untuk melaksanakan pekerjaan dan juga melayani kebutuhan sosial dari mereka yang berinteraksi dengan organisasi kerja.

Sarana dan prasarana yang ada di BAUR SIM Polres Maros sudah baik, sesuai temuan wawancara dan observasi. Mereka juga memperhatikan suasana ruang tunggu yang memungkinkan pemohon SIM dapat melihat langsung kinerja pelayanan. Cukup memuaskan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di Polres Maros juga terdapat kamar kecil, monitor TV, perpustakaan mini, ruang merokok, ruang pengaduan, dan meja tulis formulir pendaftaran. Prasarana dan sarana ujian SIM juga sudah memadai mengingat ujian di Polres Maros sudah menggunakan model ujian AVISs untuk memudahkan penyelenggaraannya.

Namun pengamatan penulis menunjukkan bahwa tidak semua meja aparatur di BAUR SIM terdapat printer atau komputer.

c. Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan penggunaan SIM sebagai pelengkap berkendara bermotor menuntut instansi dan aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanannya yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan SIM. Demikian pula, informasi masyarakat tentang tata cara dan siklus pengurusan surat izin mengemudi akan memudahkan pejabat dalam memberikan jenis bantuan.

Warga Kabupaten Maros menyadari pentingnya memiliki SIM Card untuk berkendara. Kegiatan sosialisasi kepada anak usia dini, sosialisasi kepada siswa SD, SMP, dan SMA, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau media massa seperti radio, surat kabar (koran), Instagram, dan lain sebagainya merupakan contoh upaya preventif. Sosialisasi Kegiatan Polantas di Kabupaten Maros bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna menjaga ketertiban masyarakat dengan berbagai cara. serta

tindakan pembatasan untuk mencegah pengendara yang melanggar hukum, seperti mengenakan denda.

Penulis menegaskan bahwa pendekatan sosial dan moral yang diperlukan untuk menyikapi tertib kepatuhan warga Kabupaten Maros, khususnya yang tinggal di pedalaman desa, dengan syarat memiliki surat izin mengemudi masih belum memadai.

d. Kinerja Pelayanan

Penyerahan polisi penanggung jawab administrasi SIM menunjukkan administrasi ke daerah setempat, termasuk orang yang mengajukan SIM di Satlantas Polres Maros dalam hal ini. Dalam pertunjukkan yang dapat diselenggarakan hendaknya dilihat kemampuan delegasi yang bersangkutan karena disitulah kemampuan para ahli dan kepolisian harus dilihat.

Suatu jasa dikatakan berhasil bila mampu memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, kinerja layanan mungkin tidak efektif jika pihak yang berkepentingan atau pihak yang berurusan tidak puas.

Semua asosiasi, apakah itu publik, seperti dalam kasus pemerintah, atau swasta, seperti dalam kasus komunitas bisnis, wajib mematuhi pedoman khusus dan mencapai tujuan tertentu. Hasil perintis dapat diperkirakan dari pameran atau pelaksanaan asosiasi yang bersangkutan. Aturan eksekusi harus dijamin untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam pengujian apa yang telah dicapai dan apa yang umumnya diharapkan secara keseluruhan. Standar penyajian ini juga dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban orang atas tindakan mereka.

Administrasi SIM Satuan Lalu Lintas Polres Maros memiliki norma dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Penulis mengkaji apakah kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan SIM kepada konsumen—masyarakat umum dan pihak lain selain aparat kepolisian itu sendiri—memuaskan daripada melihat kinerja yang ada saat ini. dilakukan dalam bisnis, khususnya melihat kebutuhan dan tujuan yang perlu dipenuhi. Penelitian dilakukan dengan cara demikian karena tidak menggunakan perhitungan melainkan menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah pelaksanaan resmi dapat diperkirakan dengan memperluas kapasitas pejabat untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban yang diberikan serta sifat dukungan klien.

Penulis menegaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat kepolisian dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan SIM dan kualitas pelayanan kepada pemohon SIM sejalan dengan tanggung jawab tersebut.

e. Perilaku Kerja Profesional

Apakah pelayanan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau transaksi yang telah dilakukan secara profesional dan didukung oleh etos kerja yang kuat akan terlihat dari respon pihak tersebut. Profesionalisme adalah kode etik yang dianut saat menjalankan pekerjaan atau profesi. Oleh karena itu, keterampilan yang mengesankan membutuhkan seseorang dengan kapasitas khusus yang tinggi, meskipun orang yang solid dan sikap mental yang terfokus pada keinginan untuk melakukan atau memberikan yang terbaik dan bekerja secara konsisten sesuai dengan disposisi psikologis dan kode yang telah ditetapkan.

Karena aplikasi SIM harus dibekali dengan peraturan lalu lintas yang tepat, keterampilan teknis yang tinggi diperlukan untuk kinerja layanan SIM. Mengingat pelayanan SIM disediakan di Kantor Satlantas Polres Maros, tentunya para petugas kepolisian atau petugas jaga sudah dibekali dengan baik untuk membantu para pemohon SIM memahami kelebihan dan fungsi SIM mereka.

Agar pemohon SIM memahami cara menggunakannya, petugas kepolisian perlu bertindak secara profesional dalam pekerjaannya, terutama dalam hal mematuhi peraturan lalu lintas. Jika ini tidak dilakukan, ada kemungkinan kecelakaan yang bisa membunuh seseorang di jalanan. Sebagai polisi selain membutuhkan skill yang mumpuni, mereka juga dibatasi oleh disiplin kerja yang tinggi.

Tabel 1.
Biaya Administrasi SIM Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Jenis SIM	Baru	Perpanjangan
1	A	Rp. 120.000	Rp. 80.000
2	A Umum	Rp. 120.000	Rp. 80.000
3	B1	Rp. 120.000	Rp. 80.000
4	B1 Umum	Rp. 120.000	Rp. 80.000
5	BII	Rp. 120.000	Rp. 80.000
6	BII Umum	Rp. 120.000	Rp. 80.000
7	C	Rp. 100.000	Rp. 75.000
8	D	Rp. 50.000	Rp. 30.000

Tabel 2.
Waktu Pelayanan SIM

No	Hari	Jam Pelayanan
1	Senin-Kamis	08.30-15.00 WITA
2	Jumat	08.30-11.00 WITA

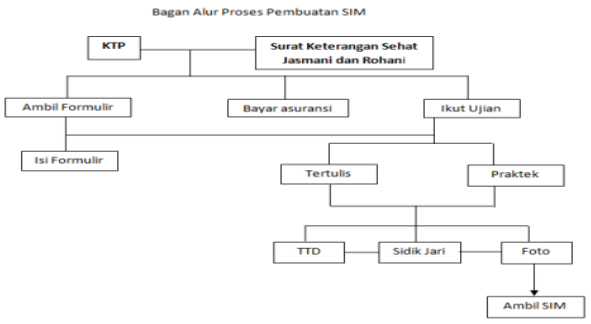

Gambar 1. Bagan Alur Proses Pembuatan SIM
Sumber: Polres Maros

f. Pelaksanaan Pelayanan

Pemohon harus memenuhi sejumlah tahapan dan persyaratan selama proses pembuatan SIM sebelum menerima SIM. Petugas wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selama proses berlangsung; Namun, ketiadaan sarana dan prasarana menyulitkan pelayanan, terutama yang berlangsung di wilayah operasi Polres Maros. Pembuatan SIM Mobile untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan SIM. Bagaimanapun, dari hasil penjajakan di Polres Maros, tidak ada SIM serbaguna karena kantor dan yayasan orang miskin telah diperoleh dari otoritas publik.

Tabel 3
Adapun Data-Data Pembuatan SIM/Bulan Pada Tahun 2022

No	Bulan	Pembuatan Sim Baru			Jumlah
		SIM A	SIM C	SIM D	Produksi SIM
1	Januari	90	303	-	393
2	Februari	24	107	-	131
3	Maret	35	105	-	140
4	April	37	166	-	203
5	Mei	127	543	-	670
6	Juli	116	431	-	547
7	Juni	116	396	-	512
8	Agustus	128	412	-	540
9	September	93	277	-	370
10	Oktober	85	253	-	338
11	November	155	556	-	711
12	Desember	94	325	-	419
Jumlah		110	3874	0	4974

Sumber: Polres Maros, 2023

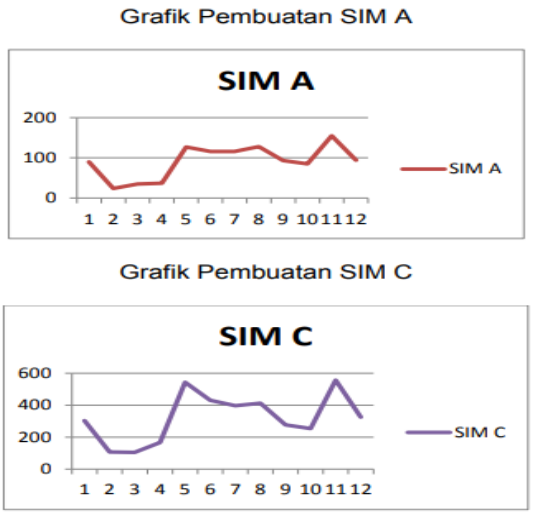

Gambar 1. Grafik Pembuatan SIM Berdasarkan Bulan

Setelah berbicara dengan polisi di Polres Maros, dimana penulis kasus ini berbicara dengan dua orang informan polisi, Pada tanggal 22 Desember 2022 penulis berbicara langsung dengan Andi Herman sebagai individu dari Satuan Lalu Lintas bagian SIM Polres Maros. Dia menambahkan:

> "Karena pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, maka perawatan dan perhatian petugas di ruang pengurus SIM dikatakan cukup baik, berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. ." Selain itu, ia mengungkapkan kinerja petugas sudah maksimal dan masyarakat belum mengeluhkan pelayanan fisik hingga saat ini. Namun, masyarakat sempat mengeluhkan ruangan yang sempit dan panas di sarana dan prasarana tersebut.

Pada 24 Desember 2022, penulis juga berbincang dengan sejumlah warga sekitar yang tertarik untuk mendapatkan SIM saat itu. Yang pertama adalah Andri, adik saya yang berusia 23 tahun dan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Dia butuh SIM A, katanya.

> "Metodologi pembuatan SIM di Polres Maros terbilang mendasar, dan prasyarat pembuatannya pun tidak dibuat-buat. Selain itu, petugas membantu masyarakat dengan memberikan arahan. Namun, petugas yang tidak menyapa orang dengan senyuman adalah lebih cenderung cuek, yang berimbas pada kemampuannya membuat SIM yang tidak sesuai aturan. Selanjutnya, pejabat yang bekerja saat ini masih belum disiplin atau tanggap. Selain itu, Frater Adri mengatakan, "Masih belum adil karena ada yang belum melalui tes tertulis atau praktek dalam proses pembuatannya dan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kewajaran jasa pembuatan SIM card."

Seperti yang diungkapkan oleh kakak Yaniarum yang lebih tua, 23 tahun, seorang mahasiswa di Maros, yang persyaratan untuk mengajukan SIM C. Berikut adalah pernyataannya:

> "Metodologi penyebarluasan surat izin mengemudi baik karena polisi sering mengarahkan upaya sehingga benar-benar sederhana dan lancar. Masih ada aparat yang lebih mengutamakan masyarakat dan mengutamakan pelayanan kepada pihak tertentu, namun jika dilihat dari segi keramahan petugas merasa nyaman dan fasilitas yang ada, namun pelayanan yang diberikan petugas saat pembuatan SIM masih kurang memuaskan karena keadilan dalam mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Seputar penegasan Marwanto (17 tahun) tentang keutamaan menerbitkan SIM (wawancara 24 Desember 2022):

> "Mengingat kami juga antri, saya yakin satu setengah jam sudah cukup untuk mendapatkan SIM. Tes tertulis dan latihan memakan waktu paling lama, yang memakan waktu sekitar 45 menit. Untuk sesi foto , anda harus menunggu kurang lebih 15 menit 78, mengingat anda harus tetap mengantri agar saya bisa memahaminya.

Kita bisa melihat dari data di atas bahwa biayanya berbeda atau pengguna jasa harus membayarnya. Biaya sebesar Rp120.000 harus dibayar oleh pemohon SIM yang mengurus sendiri, sesuai ketentuan. Apalagi, calon kartu SIM yang menggunakan administrasi delegasi diharapkan membayar minimal Rp. 250.000,-.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas mengenai kepastian dan kejelasan pelayanan, penulis menegaskan bahwa Kantor Izin Mengemudi Lalu Lintas telah berupaya memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan SIM, namun kejelasan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna jasa. tentang tata cara atau tata cara pembuatan SIM. Akibatnya, Satuan Lalu Lintas Polres Maros tidak dapat memberikan keadilan yang memadai kepada pengguna jasa karena prosedur pelayanan petugas terkait untuk menjelaskan biaya SIM dianggap tidak memadai.

3.2. Faktor Penghambat Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros

a. Tidak Disiplin

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan pegawai antara lain disebabkan oleh kurangnya ketegasan dan pengawasan pimpinan terhadap bawahan dalam menjalankan aturan yang ada sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan ruang pengelola SIM mengalami penurunan akibat kondisi tersebut.

Disiplin kerja yang adaptif dan dinamis dalam arti mampu bertindak dan berperilaku bijaksana dan konsisten dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib organisasi merupakan hal yang mutlak harus ditegakkan dan dipertahankan oleh seorang pemimpin. Disiplin kerja yang baik dari bawahannya sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah tujuan dari segala sesuatu yang dilakukannya. Hasil wawancara dengan Kapolres Awaludin Amin Polres Maros menyatakan bahwa:

> "Kami benar-benar menjaga aturan di sini, termasuk disiplin kerja. Jika petugas melanggar aturan dengan cara apapun, kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang berat. Demi meningkatkan kepuasan masyarakat, hal ini

dilakukan. Wawancara Awaludin Amin, 2 Januari 2023

Menurut penulis, berdasarkan wawancara di atas, tekad seorang pemimpin untuk menegakkan aturan demi kepuasan masyarakat terkait layanan SIM. Hal itu hanya dilakukan untuk memberikan pelayanan prima yang tentunya membuat masyarakat pengguna layanan publik senang.

b. Tingkat Kesadaran

Konsekuensi dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan konsistensi antara petugas Lalu Lintas dan calon SIM itu sendiri dengan prinsip dan pedoman di ruang pengurus SIM telah menghambat pencapaian target dari pedoman yang sebenarnya.

Apabila seseorang berusaha untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sebagai pencapaian tertingginya selama melaksanakan pekerjaan, maka keinginan atau motivasi tersebut dapat menjelma menjadi semangat kerja. Apabila seseorang berusaha mencapai hasil kerja yang maksimal yang lebih baik dari pada hasil atau prestasi yang dihasilkan oleh pegawai atau anggota lain dalam organisasi yang sama, maka motivasi atau kemauan ini dapat berubah menjadi motivasi bersaing. Sebuah instansi pemerintah dengan jumlah pejabat atau anggota yang banyak akan memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses.

Wawancara dengan salah satu petugas kepolisian setempat menghasilkan informasi sebagai berikut:

> "Untuk dan sebagai pelaksana pekerjaan di suatu organisasi atau instansi, mutlak diperlukan motivasi yang tinggi karena tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal dan poin keberhasilan kerja tanpa semangat kerja yang tinggi." Arfa, 2 Januari 2023)

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pimpinan harus selalu memberikan motivasi kepada pejabat sebelum mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya. Jika pesanan terus diberikan dan berlangsung setiap hari, tentu asosiasi bisa sampai pada tempat pencapaiannya.

c. Sarana dan Prasarana

Anggap saja kantor dan yayasan yang ada di ruang pengurusan SIM Polres Maros sudah sangat lengkap, namun dari segi batas masih sangat terbatas, misalnya ruang pengurusan SIM yang umumnya masih terbatas dan panas. Karena ruang foto SIM hanya memiliki satu camcorder, maka pendaftar harus mengantre lama untuk mengambil foto SIM. Ini menghalangi staf polisi lalu lintas untuk menawarkan bantuan berkualitas kepada calon SIM.

d. Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi

Dalam menawarkan jenis bantuan publik, pihak berwenang biasanya menawarkan dua cara berbeda kepada masyarakat umum, yaitu cara cepat dan lambat. Masyarakat sangat tertarik dengan cara cepat ini karena cepat tapi mahal. Dalam hal ini korbannya adalah orang-orang yang tidak memiliki uang atau orang miskin.

Tujuan administrasi publik adalah untuk meningkatkan kemampuan kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang dilayaninya. Administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik.

Penulis mengatakan bahwa definisi tersebut mengartikan bahwa administrasi publik adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan nilai pelaksanaan dan efisiensi.

e. Persyaratan Pembuatan SIM

Pengaruh strategi uji hipotesis SIM untuk kendaraan bermesin dalam meningkatkan kewaspadaan regulasi angkutan adalah dengan meningkatkan jumlah pemilik SIM dan mengurangi kendaraan yang tidak sesuai dengan pedoman umum. Selain itu, dalam hal informasi tentang lalu lintas, masyarakat pada umumnya juga mendapatkan informasi tentang keputusan lalu lintas yang harus diketahui oleh pengemudi kendaraan bermotor melalui penggunaan strategi uji hipotesis.

Prasyarat pembuatan SIM harus melalui uji hipotesis, hal ini merupakan hambatan kritis selama waktu pembuatan SIM. Alasannya adalah banyak teori gagal. Hal ini karena masyarakat masih belum cukup mengetahui tentang tanda-tanda, psikotes, dan cara menggunakan komputer.

Sikap positif terhadap tes teori tumbuh seiring bertambahnya pengetahuan tentang hukum lalu lintas, yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang tujuan konten dan interpretasi yang benar. Sebagai hasil dari tanggapan positif masyarakat terhadap kebijakan ini, semakin banyak orang yang memahami bahwa mematuhi peraturan lalu lintas juga mengurangi pelanggaran lalu lintas. Orang yang lebih sadar dan sadar menghindari pelanggaran lalu lintas adalah satu-satunya orang yang diuntungkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

f. Jaringan Internet

Berbagai kendala dalam program SIM di Polres Maros antara lain menawarkan bentuk bantuan pemberian SIM secara online, cepat, tepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengutamakan ketepatan, keterusterangan dan tanggung jawab. Selain itu, perlu untuk menjamin bahwa data pusat dimasukkan dan diterima sekaligus. Namun, program SIM masih menemui kendala. Karena ini program baru, modul dari core switch yang sudah rusak menyebabkan jaringan internet terkadang tidak stabil. juga hal-hal seperti komputer dan hal-hal lain. Karena pembatasan ditempatkan pada sakelar inti, tidak ada aplikasi yang berfungsi. Dampak dari keharusan tersebut adalah pengurusan SIM di wilayah Polres Maros memakan waktu.

Menurut pembuatnya, penting untuk me-refresh server antara tengah dan lokal sehingga terlepas dari apakah ada masalah jaringan, ini tidak memakan banyak waktu

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan administrasi pembuatan surat izin mengemudi di Polres Maros sesuai pedoman yang berlaku. pelaksanaan siklus bantuan dan pelaksanaannya didasarkan pada SDM yang memadai namun memenuhi sifat administrasi yang juga didukung oleh kantor dan kerangka kerja yang memuaskan dan kesadaran publik yang berguna dari pedoman peraturan transit. Masih terdapat beberapa kendala dalam penerbitan SIM Card di Polres Maros yang membuat dokumen pengemudi tidak lengkap. Biaya yang umumnya masih sulit untuk wilayah lokal di kota, pelatihan tentang kebutuhan dan masuk ke jaringan web yang harus dipikirkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2017. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Annie Sailendra, 2015. Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP, (Yogyakarta; Transa Idea Publishing,).

Aprilia Malik, Siswidiyanto, Endah Setyowati, 2012. Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Voll. No.5.

Arini T. Soemohadiwidjojo, 2014. Mudah Menyusun SOP Standard Operating Procedure, (Jakarta; Penebar Swadaya Grup).

Arini Tathagati, 2014. Step By Step Membuat SOP (Standard Operating Procedure), (Yogyakarta; Efata Publiching).

Arista Atmadjati, 2018. Layanan Prima dama Praktik Saat ini, (Yogyakarta: Deepublish,).

Arnina P, 2016. Langkah-Langkah Efektif Menyusun Sop Standard Operating Procedure, (Depok; Huta Media).

Ayu Tri Wardhani, 2015. Kualitas Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa.

Ratminto dan Atik, 2003. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Ratminto dan Winarsih, 2006. Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Richard M. Steers, 1999. Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)

Rudi M Tambunan, 2013. Standard Operating Procedure SOP edisi 2, (Jakarta; Maiestes Publishing).

Sinambela, L. P., 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara)

Syafie, I. K., 1999. Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta).

Tjiptono, F., 2000. Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi Offset).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik. Diakses pada 15 April 2020.

Yusriadi, 2018. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Deepublish).

Zulian Yamit, 2017Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, (Yogyakarta: Ekonisia).